

SEKURITISASI DONALD TRUMP TERHADAP ISU MIGRASI DAN PERBATASAN

Adityo Darmawan Sudagung¹, Rizky Amanda, Anggia Utami Dewi²

¹Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Tanjungpura, Pontianak

²Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran, Bandung

Email korespondensi: soedagoeng32@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini menganalisa proses sekuritisasi yang dilakukan Donald Trump pada isu migrasi dan perbatasan. Amerika Serikat menjadi rentan dari aktifitas terorisme dan migrasi. Kedua isu tersebut menjadi agenda utama Donald Trump pada kampanye sebelumnya. Janji Trump menjadikan “Amerika Hebat Kembali” diawali dengan rencana membangun dinding di perbatasan AS-Meksiko dan melarang imigran dari negara Muslim. Melalui metode kualitatif, tulisan ini menelaah proses sekuritisasi yang dilakukan oleh Donald Trump sejak masa kampanye sampai menjadi presiden, menggunakan konsep sekuritisasi dari *Copenhagen School* sebagai alat analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran data sekunder dari buku, jurnal, dan sumber internet. Trump merupakan aktor sekuritisasi, sedangkan Amerika Serikat adalah objek dari isu keamanan. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa proses sekuritisasi dimulai sejak Trump melakukan kampanye. *Speech act* mengenai isu-isu tersebut juga dinyatakan kembali ketika terpilih menjadi presiden. *Speech act* tersebut kemudian diimplementasikan menjadi kebijakan migrasi baru yang mencakup pelarangan imigran dari beberapa negara mayoritas Muslim dan pembangunan dinding di perbatasan dengan Meksiko.

Kata kunci: sekuritisasi, *speech act*, aktor sekuritisasi, objek keamanan

PENDAHULUAN

Perkembangan studi keamanan global terus mengalami perluasan. Isu militer sebagai ancaman utama negara tidak lagi menjadi ancaman utama. Kemunculan aktor-aktor non-negara dalam studi Hubungan Internasional juga ikut berpengaruh pada perkembangan isu keamanan global. Bahkan Amerika Serikat sejak tahun 1990-an telah memperluas ancaman keamanan nasional pasca berakhirnya Perang Dingin dengan Uni Soviet.

Pemerintahan Bill Clinton dalam dokumen *National Security Strategy* tahun 1994 mencantumkan bahwa tidak semua resiko keamanan berasal dari ancaman militer. Fenomena transnasional, seperti terorisme, penyelundupan narkoba, kerusakan lingkungan, pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan arus pengungsi juga memiliki dampak keamanan bagi kebijakan Amerika sekarang maupun jangka panjang (Hough, 2008: 14).

Tujuh tahun setelah dokumen tersebut dikeluarkan, Amerika Serikat dihadapkan pada sebuah serangan yang semakin mempertegas bahwa negara tidak lagi hanya diancam oleh sesama negara. Peristiwa 9/11 menjadi salah satu titik tolak semakin seriusnya Amerika Serikat

menyikapi ancaman keamanan global dari berbagai aspek. Opini mengenai Islam sebagai teror bagi masyarakat dunia internasional juga mulai digaungkan pasca serangan 9/11 di Amerika Serikat. Tesis yang dikemukakan oleh Huntington bahwa terdapat perang peradaban antara Barat dan Muslim semakin tampak nyata.

Selain masalah terorisme, Amerika Serikat juga memiliki permasalahan klasik di sekitar kawasan perbatasannya dengan Meksiko. Selama bertahun-tahun Amerika Serikat menaruh perhatian terhadap masalah aktifitas transnasional dari Meksiko yang sebagian besar adalah imigran ilegal (BBC, 2016). Permasalahan yang timbul akibat masuknya imigran ilegal dari Meksiko diantaranya adalah kekerasan antar individu maupun komunitas, penyelundupan manusia dan narkoba.

Kedua isu tersebut menjadi bahan kampanye dari Presiden Donald Trump sebelum menduduki kursi kepresidenan. Jika dipandang dari kajian keamanan global, apa yang dilakukan oleh Trump terhadap isu-isu tersebut merupakan suatu upaya sekuritisasi. Menurut Williams (2003: 513) penjelasan teori sekuritisasi akan diawali dengan proses konstruksi isu keamanan (apa dan siapa yang diamankan, dan terhadap ancaman apa) yang

dianalisa melalui *speech act* (pidato atau penyampaian pernyataan kepada khalayak ramai).

Peneliti tertarik melakukan kajian terhadap permasalahan keamanan global yang dihadapi oleh Amerika Serikat. Khususnya mengenai proses sekuritisasi yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump sejak beliau mengajukan diri sebagai calon presiden.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki pertanyaan penelitian: Bagaimana proses sekuritisasi yang dilakukan oleh Donald Trump sejak kampanye hingga menjadi presiden terhadap isu migrasi dan perbatasan Amerika Serikat?

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan menggambarkan proses sekuritisasi yang dilakukan oleh Donald Trump terhadap isu migrasi dan perbatasan Amerika Serikat. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui studi literatur dengan menggunakan sumber dari buku-buku, artikel dalam jurnal, dokumen, dan sumber artikel *online*. Validitas data dilakukan peneliti dengan triangulasi terhadap sumber data literatur yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan *Copenhagen School* dan Sekuritisasi

Pendekatan *Copenhagen School* merupakan salah satu cabang pendekatan studi Hubungan Internasional yang menekankan pada aspek keamanan internasional. Menurut para pemikir *Copenhagen School* keamanan internasional tidak lagi hanya semata ancaman yang bersifat militer dan ditujukan kepada negara saja. Pendekatan ini mengemukakan bahwa isu keamanan internasional telah meluas seiring perkembangan zaman.

Terdapat lima sektor keamanan yang menjadi perluasan dari sektor keamanan internasional, yaitu keamanan militer, politik, *societal*, ekonomi, dan lingkungan. Isu tradisional yang hanya membahas keamanan negara dari aspek militer telah diperluas ke beberapa isu keamanan non-tradisional, antara lain adalah terorisme, krisis keuangan global, penyakit HIV/AIDS, kerusakan lingkungan global, kemiskinan, hak asasi manusia, dan pengungsi.

Melalui perluasan sektor keamanan, para pemikir *Copenhagen School* juga mengemukakan bahwa aktor dalam keamanan juga perlu diperluas. Negara bukan lagi satu-satunya subyek keamanan (Ullman, 1983). Pada prinsipnya definisi keamanan yang dikemukakan masih sama, yaitu berhubungan dengan *survival* (keberlangsungan hidup) (Buzan B, Weaver O, dan Wilde J, 1998: 21). Kondisi mengupayakan keberlangsungan hidup terjadi apabila suatu isu menjadi ancaman yang nyata terhadap *referent object* di mana dalam pengertian keamanan non-tradisional, objek dapat berupa negara, pemerintah, wilayah, masyarakat, bahkan lingkungan hidup. Upaya untuk mengamankan objek adalah dengan tindakan yang tidak biasa. Upaya tersebut menurut Buzan (1998: 23) termasuk dalam teori *securitization* (sekuritisasi).

Teori sekuritisasi menjelaskan proses memenuhi keberlangsungan hidup dengan menempatkan isu-isu publik yang cenderung bersifat non-tradisional menjadi sebuah ancaman yang dapat mengganggu subjek keamanan. Peneliti mengulang penjelasan Williams (2003: 513) mengenai teori sekuritisasi yang telah disampaikan di bagian pendahuluan bahwa sekuritisasi akan diawali dengan proses konstruksi isu keamanan (apa dan siapa yang diamankan, dan terhadap ancaman apa) yang dianalisa melalui *speech act* (pidato atau penyampaian pernyataan kepada khalayak ramai). Pada pidato tersebut isu dibentuk menjadi satu isu keamanan dikarenakan penyampaian yang meyakinkan bahwa isu non-tradisional itu mengancam. Walaupun dimungkinkan jika melihat dari perspektif keamanan tradisional, isu tersebut tidaklah mengancam masyarakat atau negara.

Kajian terhadap penerapan teori sekuritisasi sudah pernah dilakukan di beberapa negara, seperti misalnya di Mesir melalui perlawanan kelompok Muslim fundamentalis terhadap pengaruh budaya Barat (Buzan, et.al., 1998: 124), di Indonesia pada kasus Pembentukan Badan Gabungan Khusus Untuk Penanggulangan Jaringan (Syaiful, 2010), sekuritisasi kejahatan transnasional oleh ASEAN (Emmers, 2002), dan sekuritisasi terhadap hak-hak kelompok minoritas di Eropa (Thiel, 2007). Sekuritisasi sendiri memiliki elemen yang membentuknya yaitu *referent objects* (objek keamanan), *securitizing actor* (aktor sekuritisasi), dan *functional actors* (aktor fungsional).

Objek keamanan adalah negara Amerika Serikat, termasuk di dalamnya masyarakat, wilayah, dan identitas nasional. Aktor sekuritisasi merupakan seseorang atau sekelompok orang yang mengeluarkan *speech act*. Dalam hal ini yang biasanya mengambil peran adalah pemimpin politik, birokrat, pemerintah, pelobi, dan kelompok penekan (*pressure groups*). Orang-orang di atas dapat berbuat mengatasi atau menyatakan ancaman terhadap objek sebagai perwakilan dari negara. Pada penelitian ini, *securitizing actor* yang dimaksud adalah Donald Trump sejak beliau maju sebagai calon presiden dari Partai Republik hingga menjadi Presiden Amerika Serikat. Aktor fungsional adalah aktor yang mempengaruhi proses penyampaian pidato diterima oleh audiens, tetapi aktor ini bukanlah objek keamanan maupun aktor sekuritisasi. Dalam konteks penelitian ini audiens adalah masyarakat Amerika Serikat dan aktor fungsional merupakan para pendukung Trump baik anggota Partai Republik maupun simpatisan.

Model sekuritisasi menurut Ralf Emmers (2007: 111-115) dilakukan melalui dua tahap yang terdiri atas dua indikator, antara lain adalah (1) keberhasilan sekuritisasi dan (2) tindakan luar biasa dan motif sekuritisasi. Kedua tahapan tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana dan kapan sebuah isu dilihat dan diperlakukan sebagai *existential threat* dalam keamanan (Emmers, 2007: 112).

Tahap pertama adalah dengan menggambarkan sebuah isu, orang-orang, atau entitas sebagai ancaman bagi objek keamanan (Emmers, 2007: 112). Tahap ini menjelaskan bagaimana aktor sekuritisasi menggunakan kekuasaannya untuk mempersepsikan bahwa isu tertentu merupakan sebuah ancaman yang nyata bagi keberlangsungan objek keamanan. Penyampaian persepsi ini melalui pernyataan-pernyataan. Sedangkan tahap kedua dapat terjadi apabila aktor sekuritisasi dapat meyakinkan audiens (opini publik, politisi, aparat militer, atau elit lainnya) bahwa objek keamanan benar-benar terancam, sehingga diperlukan tindakan luar biasa (Emmers, 2007: 112). Menurut Matt McDonald (2008: 114), tindakan ini merupakan bagian dari negosiasi antara pembicara dan audiens.

Setiap tindakan sekuritisasi meliputi keputusan politik dan hasil dari kebijakan politik dan sosial (Emmers, 2007: 114). Hanya saja tindakan

sekuritisasi yang sukses adalah ketika dianggap kebijakan politik yang diberlakukan selama ini tidak sanggup mengatasi ancaman yang datang (Emmers, 2007: 114). Tahap kedua merupakan respon dari pernyataan yang telah diterima oleh audiens. Kemudian aktor sekuritisasi membuat aksi luar biasa yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Aksi tersebut untuk meningkatkan level tindakan dari yang sebelumnya pernah dilakukan.

Keamanan Masyarakat

Dalam buku *Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe*, Weaver dkk menjelaskan bahwa keamanan masyarakat merupakan suatu hal yang penting berkaitan dengan kedaulatan negara-negara pasca Perang Dingin di Eropa (Roe, 2007: 165). Dijelaskan bahwa terdapat pertemuan antara keamanan negara dan keamanan *societal*. Di mana keamanan negara menekankan ancaman pada kedaulatannya, sedangkan keamanan *societal* menekankan pada identitas masyarakat. Pertemuan itu dapat dijelaskan dengan diawali timbulnya kerawanan di tingkat masyarakat kemudian mengarah ke kedaulatan negara. Kerawanan-kerawanan tersebut akan dijelaskan lebih lanjut setelah pemaparan mengenai isu umum ancaman sektor *societal*.

Pada buku *Security: A New Framework for Analysis*, Buzan, Weaver, dan Wilde (2008: 121) lebih spesifik meringkas setidaknya terdapat tiga isu yang umum dianggap sebagai ancaman terhadap sektor kemasyarakatan, yaitu:

- 1) Migrasi, yang dijelaskan sebagai fenomena orang-orang X berpindah atau terpisah karena pengaruh dari orang-orang Y. Komunitas X ini tidak lagi seperti mereka yang sebelumnya di tempat asalnya, tetapi akan terkontaminasi sesuai dengan populasi di tempat tujuan perpindahan.
- 2) *Horizontal competitions*, dijelaskan meskipun orang-orang X masih tinggal di tempat asalnya akan tetapi akibat dari pengaruh budaya dan bahasa di tempat tetangga sehingga mereka pun mengikuti pengaruh dari orang-orang Y.
- 3) *Vertical competitions*, orang-orang akan berhenti menganggap dirinya sebagai X, karena telah dilakukan proyek integrasi atau suksesi yang mengakibatkan mereka meluaskan identitas atau memecahkan identitasnya.

Dalam menanggapi ancaman-ancaman tersebut, masyarakat pada umumnya mengambil dua buah tindakan. Pertama, memindahkan isu tersebut sebagai sektor politik di mana menganggap

isu tersebut sebagai ancaman yang harus dibahas dalam agenda negara (Buzan, 2008: 121). Pada tindakan ini negara memainkan peran dalam mengatasi ancaman tersebut karena negara juga dibentuk oleh masyarakat-masyarakat di wilayah tersebut. Seperti contoh mengatasi ancaman dari migrasi, negara dapat menerapkan undang-undang dan kontrol terhadap perbatasan (Buzan, 2008: 121). Kedua, tindakan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri tanpa melibatkan unsur negara. Langkah-langkah yang biasa dilakukan, yaitu mendominasi pemerintah yang berkuasa (contohnya, bangsa Tutsi), membentuk pemerintahan negara mereka sendiri (contohnya, bangsa Slovenia, kaum Zionis), atau hidup tersendiri memisahkan dari kelompok mayoritas (contohnya, bangsa Yahudi di Eropa) (Buzan, 2008: 121). Pada kasus isu perbatasan dan migrasi di Amerika Serikat, penanggulangan isu dilakukan oleh negara melalui representasi Donald Trump sebagai presiden.

Teori keamanan masyarakat yang dijelaskan memberikan petunjuk bagi peneliti dalam melakukan analisis. Pertama, peneliti menggunakan konsep tiga isu ancaman untuk memetakan ancaman yang terjadi di masyarakat. Kedua, menjelaskan upaya yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam mengatasi ancaman tersebut. Pada konteks penelitian ini, penggunaan teori ini adalah memberikan analisis ancaman yang dihadapi oleh Amerika Serikat akibat adanya migrasi muslim dan warga Meksiko. Kemudian, membantu menjelaskan respon yang dilakukan oleh Donald Trump, sebagai presiden, dalam menanggulangi ancaman tersebut.

Migrasi Internasional

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan terjadinya migrasi internasional. Teori ekonomi neo-klasik menjelaskan migrasi internasional sebagai suatu pilihan rasional individu akan konsekuensi dari adanya perbedaan upah dan kondisi pekerjaan di antara negara-negara pengirim dan penerima migran. Teori ekonomi baru dari migrasi di sisi lain menjelaskan migrasi sebagai suatu keputusan logis suatu keluarga atau rumah tangga untuk memaksimalkan pendapatan dan meminimalisasi resiko terhadap pendapatan keluarga. Sehingga menurut teori ini, bahkan jika tidak terdapat perbedaan level upah, migrasi internasional akan tetap terjadi sebagai bentuk

diversifikasi sumber pendapatan keluarga. Beberapa teori lain yang juga menjelaskan fenomena migrasi internasional adalah teori system dunia (*world system theory*) dan pendekatan struktur historis (*historical-structural approach*) yang menjabarkan migrasi sebagai konsekuensi natural dari globalisasi ekonomi dan ekspansi hubungan ekonomi kapitalis, serta migrasi sebagai suatu alat untuk memobilisasi tenaga kerja murah untuk kapital.

Beranjak dari pendekatan teoritis akan migrasi internasional, hal yang patut menjadi sorotan adalah bahwa fenomena migrasi internasional juga berkembang sebagai kajian yang terkait dengan konflik, perang, dan bencana alam. Di mana dalam konteks ini, migrasi internasional dilakukan oleh para migran bukan secara sukarela namun terpaksa (*forced migration*). Dalam pengartikulasian yang lain, migrasi ini juga dikatakan sebagai migrasi ireguler dan sangat erat kaitannya dengan keamanan negara dan manusia, terutama di negara penerima. Koser (2005) menyatakan bahwa migrasi ireguler menimbulkan dilema baik bagi negara-negara, juga bagi para migran sendiri di mana mereka terpapar resiko insecurities dan kerentanan. Penanganan pengungsi dan migran ireguler merupakan suatu isu yang banyak diperdebatkan, mengingat terdapat banyak kasus di mana negara penerima dianggap gagal dalam mengontrol permasalahan ini dengan efektif tanpa menimbulkan dampak negatif yang tidak diharapkan.

Koser (2005) menekankan pembahasan migrasi ireguler dan keamanan negara pada tarik menariknya konsep hak negara untuk mengontrol perbatasannya demi menjaga kedaulatan dengan hak prerogatif negara untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Negara penerima kerap dihadapkan oleh tuntutan kemanusiaan dan tanggung jawab moral untuk menerapkan kebijakan pintu terbuka terhadap para pengungsi dan migran pada umumnya, versus resiko permasalahan penerimaan dan bentrokan sosial dengan masyarakat.

Adapun kebijakan migrasi terutama untuk mengontrol migrasi ireguler sudah berkembang sejak pertengahan 1990an, dan kebijakan yang semakin ketat dan tertutup banyak diambil oleh negara-negara penerima setelah terjadinya tragedi 11 September 2001 di Amerika Serikat (Koser, 2005). Tipologi pendekatan kebijakan negara

penerima dapat dilihat dari beberapa tahapan migrasi yakni pengaturan pra-kedatangan, pengaturan perbatasan, dan pengaturan setelah kedatangan.

Karakter Perbatasan

Peneliti memilih menggunakan konsep perbatasan yang cakupannya tidak hanya sekedar batas atau wilayah yang menjadi batas, tapi meliputi juga semua yang berada di perbatasan tersebut, seperti masyarakat. Peneliti juga akan menyampaikan konsep mengenai karakteristik perbatasan negara. Peneliti merujuk pada penjelasan oleh Martinez (1998: 57) yang membagi karakteristik perbatasan ke dalam empat kategori, yaitu:

1. *Alienated Borderland*
2. *Co-existent Borderland*
3. *Interdependent Borderland*
4. *Integrated Borderland*

Menurut Martinez (1994: 2), *alienated borderland* adalah suatu wilayah perbatasan yang sangat sulit terjadi aktifitas lintas batas berupa perdagangan atau hubungan antar masyarakat. Hal ini disebabkan adanya konflik bersenjata, sengketa politik, penanaman nasionalisme yang intens, kebencian ideologi, permusuhan agama, perbedaan budaya, dan rivalitas etnis. Sementara, *co-existent borderland* adalah kondisi perbatasan di mana sudah terjadi hubungan lintas batas. Hanya saja hubungan tersebut masih belum signifikan, sebatas pada hubungan antar dua negara yang membaik dan hubungan antar masyarakat yang dibatasi oleh aturan negara. Seperti misalnya ada masalah yang belum diselesaikan terkait kepemilikan sumber daya strategis di wilayah perbatasan (Martinez, 1994: 2).

Kategori yang ketiga adalah *interdependent borderland*. Kategori ini merupakan wilayah perbatasan yang relatif stabil dalam hubungan internasional. Penduduk yang tinggal di masing-masing daerah perbatasan negara terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian saling menguntungkan dan pada tingkat yang kurang lebih setara. Pada kategori ini diharapkan terjadi sistem ekonomi yang saling menguntungkan antar masyarakat di perbatasan dua negara (Martinez, 1994: 4). Pada kategori keempat, Martinez (1994: 5) menjelaskan *integrated borderland* sebagai

kondisi di mana kedua bangsa yang berbatasan mengeliminasi semua perbedaan politik serta hambatan perdagangan dan perpindahan manusia yang melintasi batas mereka. Aspek kedaulatan tidak menjadi hal yang formal dan dapat dinegosiasikan oleh masing-masing negara sehingga tidak terjadi konflik mengenai hal tersebut. Pembagian kategori perbatasan digunakan untuk memetakan kondisi perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko.

Ancaman Keamanan Amerika Serikat: Islam Radikan dan Imigran Ilegal

Sentimen terhadap warga Muslim merupakan suatu dampak langsung dari peristiwa 11 September 2001 yang dilakukan oleh Al-Qaeda. Penyematan istilah terorisme kepada Muslim semakin menguat karena dianggap sebagai pihak yang paling bersalah dalam peristiwa penyerangan terhadap Gedung World Trade Center yang menewaskan 2.998 orang (Hough, 2008: 76). Angka 2.998 korban meninggal bukan jumlah yang sedikit bagi negara adidaya Amerika Serikat. Negara yang dianggap sebagai polisi dunia justru dihantam oleh serangan yang begitu parah di dalam negaranya sendiri. Hal ini meningkatkan kewaspadaan Amerika Serikat baik sebagai negara maupun sebagai entitas bangsa. Isu mengenai Muslim di Amerika Serikat selalu menarik untuk dibahas pasca peristiwa 9/11. Begitu juga yang dilakukan oleh Donald Trump selama masa kampanye.

Ditambah lagi temuan peneliti menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Pew Research menyebutkan bahwa terdapat kebencian dari penduduk Muslim terhadap warga Amerika Serikat (Trump, 2015). Hasil survei lainnya dilakukan oleh *Center for Security Policy* menunjukkan bahwa 51% peserta survei setuju bahwa warga Muslim di Amerika Serikat berhak untuk diatur oleh aturan syariah (Trump, 2015). Menurut Trump (2015), aturan Syariah hanya akan melegalkan aktifitas teror yang menasar pada kalangan non-muslim Amerika Serikat dan berbahaya bagi wanita. Berdasarkan hasil survei tersebut, Donald Trump (2015) pada pernyataan resmi yang peneliti kutip dari www.donaldjtrump.com menyebutkan bahwa Amerika Serikat sebagai negara dan identitas nasional harus bisa mempertahankan diri dari

ancaman serangan oknum yang mengatasnamakan Jihad. Beliau juga mengelaborasi janji tersebut dengan menyebutkan jika menjadi presiden, mereka akan menjadikan “Amerika Hebat Kembali”. Di kalangan warga Amerika Serikat yang esktrim, isu ini sangat menjual selama kampanye Trump. Semangat nasionalisme tinggi yang disuarakan oleh Donald Trump menjadi salah satu poin unggul Trump dibanding Hillary Clinton.

Trump menyampaikan bahwa penyebab utama atas banyaknya kejadian teror salah satunya penembakan masal di Orlando adalah karena AS membiarkan imigran dengan pandangan radikal Islam untuk masuk ke AS. Oleh karenanya, Trump menyampaikan rencana pelarangan imigrasi dari negara-negara dengan sejarah terorisme akan menjadi prioritasnya. Ia akan menggunakan hak eksekutif presiden ini untuk melindungi rakyat Amerika.

Ancaman kedua yang juga krusial bagi keamanan masyarakat Amerika Serikat adalah keberadaan imigran ilegal Meksiko. Donald Trump menyebutkan bahwa imigran dari Meksiko merupakan orang-orang yang bermasalah, dan membawa masalah bagi Amerika (Serikat), seperti penyelundup obat-obatan terlarang, pelaku kejahatan, pemerkosaan, walaupun beberapa di antara mereka adalah orang-orang baik (TIME, 2015).

Kedua isu tersebut dipandang dalam konsep keamanan masyarakat termasuk ke dalam isu migrasi dan *horizontal competitions*. Di mana masuknya warga dengan identitas nasional yang lain dapat memberikan ancaman bagi identitas warga asal. Selain dari pendekatan keamanan masyarakat, ancaman juga dapat terlihat pada keamanan manusia dimana keselamatan warga Amerika Serikat terganggu. Ancaman seperti ketakutan pada aksi terorisme yang mungkin saja dilakukan kembali oleh kelompok Islam radikal. Atau ancaman keselamatan diri maupun masyarakat dari penyelundupan narkoba dan kriminalitas yang disebabkan oleh banyaknya imigran gelap Meksiko.

Penyampaian Isu oleh Donald Trump: Masa Kampanye dan Setelah Pemilihan

Isu imigrasi merupakan isu yang cukup menjadi sorotan utama dalam politik dalam negeri banyak negara penerima migran. Dengan meningkatnya eskalasi konflik di beberapa region beberapa tahun terakhir ini, maka jumlah pengungsi dan migran ireguler pun meningkat dengan sangat tajam. Hal ini tentunya menjadi perhatian para pemangku kebijakan di level nasional maupun internasional, termasuk di Amerika Serikat sebagai salah satu negara penerima migran tertua yang ada.

Dalam pemilihan umum presiden Amerika Serikat 2016 lalu, isu imigrasi merupakan salah satu isu yang paling kompleks selain isu-isu seperti ekonomi, terorisme, sistem kesehatan, aborsi dan hak minoritas, dengan lebih dari dua puluh persen daftar pemilih menyatakan bahwa pandangan kandidat atas imigrasi menjadi faktor penting dalam pilihan mereka (Jones, 2015). Isu yang terkait dengan imigrasi juga tentunya adalah isu perbatasan, yang menjadi isu yang diangkat dengan prioritas tinggi khususnya oleh para kandidat dari Partai Republik.

Secara umum, pandangan Republikan terhadap imigrasi tertuang dalam *Republican Platform 2016*¹ yang berisi:

“America’s immigration policy must serve the national interest of the United States, and the interests of American workers must be protected over the claims of foreign nationals seeking the same jobs.Illegal immigration endangers everyone, exploits the taxpayers, and insults all who aspire to enter America legally. In a time of terrorism, drug cartels, human trafficking, and criminal gangs, the presence of millions of unidentified individuals in this country poses grave risks to the safety and sovereignty of the United States. Our highest priority, therefore, must be to secure our borders and all ports of entry and to enforce our immigration laws.”
(Republican Platform, 2016).

Acuan di atas memaparkan bahwa pengamanan perbatasan dan semua jalur masuk, serta penegakkan hukum imigrasi harus menjadi prioritas tertinggi pemerintah AS. Dalam

Amerika Serikat, yang dituliskan setiap konvensi nasional partai diselenggarakan.

¹ *Republican Platform* merupakan dokumen resmi tertulis yang mendeskripsikan detail prinsip-prinsip, pijakan kebijakan dan prioritas-prioritas dari Partai Republik,

aktualisasinya, pembangunan dinding pembatas di sepanjang perbatasan selatan AS didukung dengan penuh oleh Republikan. (The Republican Platform and RNC Platform Committee, 2016)

Seiring dengan pandangan di atas, Trump sebagai kandidat presiden AS dari Partai Republik selalu menyebutkan penyampaian isu-isu terkait imigrasi dan perbatasan dalam kampanye-kampanyenya. Pada pidatonya tanggal 16 Juni 2015, Trump menyatakan bahwa imigran dari Meksiko merupakan orang-orang yang bermasalah, dan membawa masalah bagi Amerika (Serikat), seperti penyelundup obat-obatan terlarang, pelaku kejahatan, pemerkosaan, walaupun beberapa di antara mereka adalah orang-orang baik (TIME, 2015). Trump menambahkan, bahwa ia akan membangun dinding besar sepanjang perbatasan selatan AS, yang akan dibangun dengan sangat murah, dengan Meksiko yang akan membayarnya (TIME, 2015). Lebih lanjut pada 26 Juli 2015, Trump menyampaikan bahwa rencana kebijakan imigrasinya akan dimulai dengan mendeportasi para imigran ireguler yang “jahat”, mengembalikan mereka ke tempat mereka berasal (Garver, 2015). Migran ireguler yang tidak berdokumen yang jumlahnya diperkirakan sekitar 11 juta orang ini dikatakan akan dapat dideportasi dalam jangka waktu delapan belas bulan hingga dua tahun dengan manajemen yang baik (Haddon, 2015).

Terkait isu keamanan nasional, terorisme dan kaitannya dengan isu imigrasi, Trump menyatakan dalam beberapa pidato dan wawancara bahwa reformasi kebijakan imigrasi merupakan elemen kritis dari kebijakan anti-terorisme yang akan ia jalankan. Trump menyampaikan bahwa penyebab utama atas banyaknya kejadian teror salah satunya penembakan masal di Orlando adalah karena AS membiarkan imigran dengan pandangan radikal Islam untuk masuk ke AS. Oleh karenanya, Trump menyampaikan rencana pelarangan imigrasi dari negara-negara dengan sejarah terorisme akan menjadi prioritasnya. Ia akan menggunakan hak eksekutif presiden ini untuk melindungi rakyat Amerika. Pada 13 Juni 2016, Trump menyatakan, “*When I am elected, I will suspend immigration from areas of the world when there is a proven history of terrorism against the United States, Europe or our allies, until we understand how to end these threats.*” (Politico, 2016). Mengambil pendirian yang tegas terhadap pembatasan imigrasi

ke AS, Trump berulang kali menyebutkan bahwa tindakan pembatasan dan pengaturan imigrasi ini ditujukan pada mereka yang masuk dan berada di AS sebagai ilegal, sementara bagi mereka yang legal dan memberikan kontribusi positif terhadap negara, maka mereka akan tetap diterima dan disambut dengan tangan terbuka.

Setelah menang dalam pemilihan umum dan terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-45, Trump menjalankan seratus hari pertama pemerintahannya dengan mengeluarkan beberapa perintah eksekutif (*executive orders*). Terkait isu imigrasi dan keamanan yang ia angkat pada masa kampanye, pada 25 Januari 2017 Trump mengeluarkan perintah eksekutif “*Border Security and Immigration Enforcement Improvements*” yang utamanya berisi perintah untuk mengamankan perbatasan selatan Amerika Serikat melalui pembangunan segera dinding di sepanjang perbatasan, yang dimonitor dan didukung oleh personil yang memadai, dengan tujuan untuk menghalangi masuknya imigrasi ilegal, perdagangan manusia dan obat-obatan terlarang, serta tindakan terorisme (The White House, 2017).

Kemudian pada 27 Januari 2017, Trump mengeluarkan perintah untuk melindungi bangsa dari teroris asing untuk masuk ke AS dengan melarang imigrasi dari negara Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman selama 90 hari, atau “*Executive Order: Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States*” (The White House, 2017). Namun pada 6 Maret 2017, perintah eksekutif “*Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States*” direvisi, dengan Irak dikeluarkan dari daftar negara yang disuspen setelah pemerintah Irak mengatur prosedur pengetatan skrining visa dan pembagian data bersama dengan AS. Selain itu, para imigran dari negara tersebut yang termasuk di daftar namun sudah terdaftar sebagai pemegang visa, atau para pengunjung yang sudah menerima suaka tidak akan termasuk pada perintah eksekutif ini (The White House, 2017).

Kebijakan Migrasi Baru Amerika Serikat

Seperti sudah dijelaskan di paragraf sebelumnya, Donald Trump pada masa seratus hari pertama mengeluarkan perintah untuk melarang masuknya warga negara dari Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman

selama 90 hari. Meskipun kemudian beliau melakukan revisi pada tanggal 6 Maret 2017 dengan mengeluarkan Irak dari daftar negara terlarang karena mereka telah mengatur prosedur pengetatan skrining visa dan pembagian data bersama dengan AS.

Meskipun terdapat ketentuan bahwa para imigran dari negara tersebut yang termasuk di daftar namun sudah terdaftar sebagai pemegang visa, atau para pengungsi yang sudah menerima suaka tidak akan termasuk pada perintah tersebut. Pada bagian ini kita dapat melihat bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Donald Trump di bidang imigrasi merupakan pengimplementasian dari janji politiknya selama masa kampanye. Trump sangat konsisten pada pernyataan-pernyataan yang dijanjikan mengenai imigrasi, khususnya terhadap imigran Muslim. Kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ancaman terorisme yang diutarakan oleh Trump sebagai bagian dari kelompok Muslim radikal.

Kebijakan Pembangunan Dinding Perbatasan AS-Meksiko

Kebijakan Trump untuk membangun dinding perbatasan antara AS dan Meksiko menjadi salah satu sorotan publik internasional. Pembangunan dinding di perbatasan merupakan salah satu kontroversi lain setelah kebijakan Trump yang membatasi imigran dari beberapa negara Muslim datang ke AS. Berdasarkan rencana awal, tembok tersebut akan dibangun sepanjang 200 mil dengan tinggi 12.2 meter. Pada tanggal 25 Januari 2017 Trump telah menandatangani keputusan presiden dalam membangun tembok perbatasan tersebut. Total estimasi biaya yang akan dikeluarkan dalam pembangunan dinding tersebut adalah 11,84 juta dollar AS. (Pitoko, 2017).

Pembangunan dinding adalah lanjutan dari proyek pembatasan imigran yang dikampanyekan oleh Trump. Selain imigrannya, pembangunan dinding juga ditujukan untuk membatasi penyelundupan barang ilegal yang masuk ke AS dari Meksiko (National Geographic Indonesia, 2017). Meskipun demikian sebenarnya perbatasan Amerika Serikat sudah ada yang memiliki dinding pembatas. Namun, tingginya hanya berkisar 5,5 meter. Kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Trump adalah meninggikan dinding-dinding yang sudah ada dan membangun dinding baru di tempat

yang belum terpasang dinding perbatasan. Pemerintah Trump juga akan melakukan seleksi ketat pada perbatasan dengan melakukan pemeriksaan mendalam untuk memutuskan siapa yang berhak masuk ke Amerika Serikat dari perbatasan Meksiko.

Pembangunan perbatasan ini akan menempatkan karakter perbatasan Amerika Serikat-Meksiko pada kondisi *alienated*. Persis seperti yang terjadi pada Jerman Barat dan Timur dengan Tembok Berlin sebagai pemisah antara kedua negara. Pengontrolan yang ketat terhadap warga negara asing yang masuk di perbatasan negara menjadi salah satu ciri khas dari karakter perbatasan *alienated*. Jika mengacu pada perspektif keamanan nasional, hal ini sangat mungkin dilakukan karena kedaulatan negara adalah hal yang harus dipenuhi. Sehingga keutuhannya sebagai suatu negara harus dipertahankan dari segala bentuk ancaman, khususnya dari ancaman imigrasi ilegal dan dampak negatif lain yang ditimbulkan.

Proses Sekuritisasi Donald Trump terhadap isu Muslim dan Perbatasan AS-Meksiko

Tahap satu sekuritisasi yang dilakukan oleh Donald Trump dimulai sejak mencalonkan diri sebagai Calon Presiden dari Partai Republik. Proses ini diawali dengan penyampaian pidato-pidato di hadapan konstituen dan masyarakat Amerika Serikat selama masa kampanye. Menurut peneliti tahap pertama berakhir ketika Donald Trump ditetapkan menjadi pemenang pada pemilihan presiden tahun 2016 lalu. Ketika menjadi presiden, Trump menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut untuk mengeksekusi janji-janji politik terkait isu migrasi, yaitu pelarangan Muslim dan pembangunan dinding. Tahap kedua dimulai sejak Trump menjadi presiden kemudian mengeluarkan kebijakan baru migrasi Amerika Serikat. Motif sekuritisasi juga peneliti bahas pada bagian ini.

Selama kampanye Trump selalu maju dengan jargon “Amerika Hebat Kembali”. Ancaman isu migrasi yang sudah peneliti paparkan sebelumnya menjadi poin utama Trump mewujudkan jargon tersebut. Menurut Trump dan tim yang mendukung, khususnya Partai Republik. Keberadaan imigran ilegal, baik berasal dari negara Muslim yang diindikasikan membawa ideologi Islam radikal dan

berasal dari Meksiko yang berdampak pada kriminilitas, merupakan sumber masalah di Amerika Serikat saat itu. Sehingga mengatasi masalah tersebut menjadi cara yang ampuh untuk mengamankan Amerika Serikat secara nasional.

Peran *Republican Platform* menjadi penting, terutama setelah Trump terpilih menjadi kandidat yang mewakili Partai Republik. Artinya, Trump sebagai aktor sekuritisasi menjadi corong utama penyampai aspirasi prinsip-prinsip utama Republikan yang memang pada dasarnya memiliki pandangan keras terhadap imigrasi. Dalam aktualisasinya, pembangunan dinding pembatas di sepanjang perbatasan selatan AS didukung dengan penuh oleh Republikan. (*The Republican Platform and RNC Platform Committee*, 2016). Mengacu pada fakta tersebut, dapat dijelaskan bahwa *Republican Platform* merupakan *functional actors* dalam proses sekuritisasi.

Pidato-pidato Trump yang mengangkat permasalahan imigrasi tercatat disampaikan pada tanggal 16 Juni 2015, 26 Juli 2015, 13 Juni 2016, 22 Januari 2017, dan 27 Januari 2017. Inti pidato-pidato tersebut telah peneliti paparkan pada bagian sebelumnya. Poin penting dalam penyampaian pidato keamanan yang sukses adalah adanya proses pengalihan isu non-keamanan menjadi isu keamanan. Kedua, terdapat respon dukungan dari audiens (masyarakat Amerika Serikat) sehingga meyakini bahwa isu non-keamanan tersebut adalah isu keamanan. Penentuan bahwa pidato keamanan Trump berhasil adalah ditetapkannya beliau sebagai pemenang pemilu dengan mengantongi suara 304 *electoral college* (Shabad, 2017). Sementara syarat minimal seorang kandidat memenangkan pemilihan presiden adalah memenangkan 270 *electoral college*.

Kekuasaan Trump sebagai presiden akan secara sepenuhnya di bawah kontrol Partai Republik. Hal ini ditentukan dari kemenangan para kandidat Senat Republik yang mengalahkan penantang Demokrat di negara-negara bagian kunci. Partai Republik juga mempertahankan dominasi di parlemen. Melalui kontrol di Senat berarti Trump akan mendapatkan keleluasaan besar dalam menunjuk hakim-hakim Mahkamah Agung (VOA Indonesia, 2016). Temuan data tersebut menunjukkan bahwa posisi Trump sebagai presiden sangat kuat dan dapat mempengaruhi kebijakan keamanan nasional. Hal ini terlihat dari

dikeluarkannya dua kebijakan imigrasi sesuai dengan janji kampanyenya. Meskipun ramai kita temukan berita yang menunjukkan demonstrasi serta penolakan terhadap kebijakan Trump.

Pada tahap kedua sekuritisasi, dapat kita lihat bahwa proses sekuritisasi isu imigran ilegal khususnya yang berasal dari Meksiko dan negara-negara Islam radikal sudah lama menjadi isu kompleks di AS, namun pasca 9/11 hal tersebut menjadi lebih krusial. Motif yang sangat jelas dari proses sekuritisasi yang dilakukan Trump adalah memenangkan posisi presiden pada pemilihan 2016 lalu. Trump menjadikan isu imigrasi sebagai salah satu poin utama kampanyenya karena selama ini pemerintahan yang lalu tidak terlalu tegas menyikapi masalah tersebut. Trump juga meningkatkan kembali identitas nasional melalui slogan “Amerika Hebat Kembali”. Selama ini terjadi pertentangan di masyarakat Amerika Serikat yang merasa keamanan diri maupun identitas nasionalnya terancam dengan kedatangan banyak warga imigran ke Amerika Serikat.

Selama proses pembuatan tindakan luar biasa yang dikeluarkan oleh Presiden Trump, beliau juga melakukan pemberhentian pejabat-pejabat penting yang dianggap menentang kebijakan imigrasi tersebut. Tindakan luar biasa yang dimaksud adalah tindakan menandatangani kebijakan-kebijakan baru, yaitu pelarangan imigran dari tujuh negara Muslim dan pembangunan dinding di perbatasan AS-Meksiko. Kedua kebijakan tersebut adalah eksekusi dari penyampaian pidato Trump sejak kampanye hingga dinyatakan menjadi Presiden Amerika Serikat. Kebijakan tersebut juga bersifat lebih ekstrem daripada kebijakan imigrasi yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Obama. Sehingga peneliti berpendapat dua kebijakan baru mengenai imigrasi tersebut tergolong tindakan luar biasa yang disebutkan oleh pemikir *Copenhagen School*.

Salah satu orang dengan posisi penting yang diberhentikan adalah Jaksa Agung Sally Yates. Trump menilai Yates tidak tegas dalam hal keamanan nasional. Pernyataan tersebut diklarifikasi oleh Yates dengan menyatakan bahwa beliau tidak akan membela kebijakan anti imigran dari tujuh negara yang dikeluarkan oleh Trump karena dianggap tidak sesuai hukum (Henderson, 2017). Senator Ted Cruz dari Partai Republik mendukung keputusan Trump memberhentikan Yates karena menurut beliau Yates tidak mematuhi

perintah Presiden dan juga tidak tegas dalam melaksanakan hukum negara. Cruz berpendapat bahwa selama ini negara terlalu lemah dalam menyikapi masalah imigran gelap, sehingga sudah saatnya negara bertindak tegas mengatasi ancaman tersebut (Henderson, 2017). Pejabat lain yang diganti oleh Trump adalah Direktur Imigrasi dan Penerapan Bea Cukai, Daniel Ragsdale.

Kebijakan Trump melakukan pelarangan bagi warga dari 7 negara Muslim mendapatkan dukungan maupun penolakan. Dukungan terhadap proses sekuritisasi yang dilakukan Trump dengan kebijakan pelarangan imigran datang dari Juru Bicara Kepresidenan, Sean Spicer. Spicer pada pernyataan resminya mengambil kasus teroris di Quebec sebagai salah satu peringatan bagi Amerika Serikat untuk tetap waspada terhadap ancaman teror (Henderson, 2017). Selain Cruz, Spicer, dukungan juga disampaikan oleh Stephen Miller yang merupakan penasihat senior untuk Donald Trump. Proses seleksi imigran secara ketat akan membantu mengurangi potensi ancaman dari negara yang berbahaya. Beliau menyampaikan bahwa sebaiknya orang yang akan masuk ke Amerika Serikat adalah orang yang benar-benar mencintai dan mendukung negara tersebut (Henderson, 2017).

Trump tetap kukuh dengan keputusan meskipun mendapatkan tentangan dari beberapa pihak. Trump ingin menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus konsisten dengan janji kampanye. Tidak hanya sekedar retorika, tapi berani mengambil aksi dalam mencapai tujuan kemajuan negara. Selain dari perspektif seorang pemimpin, jika kita analisis dari dukungan parlemen Trump sangat wajar untuk terus mempertahankan keberhasilan pidato keamanannya. Karena sejak pemilihan, dukungan kongres sangat penuh terhadap Trump. Suara-suara negatif terhadap kebijakan tersebut bisa saja dijadikan sebagai penambah motivasi untuk berjuang mewujudkan "Amerika Hebat Kembali". Trump sendiri sudah membuktikan meskipun selama kampanye beliau banyak mendapatkan suara-suara negatif dan kritikan, namun ternyata strategi politik beliau berhasil. Hingga mampu membalikkan keadaan tersudut menjadi pemenang pemilihan presiden Amerika Serikat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagai aktor politik yang mengangkat isu keamanan,

dukungan secara politis juga diperlukan. Selain untuk membantu proses legislasi di tingkat parlemen, juga untuk menjangkau masyarakat di level bawah. Sebagai bahan penyeimbang dari informasi di media yang cenderung tidak netral.

Pola komunikasi Trump yang mengusung isu keamanan non-tradisional dapat dijadikan salah satu contoh bagi calon-calon pemimpin lainnya. Trump berani mengambil isu-isu yang sangat sensitif dan belum terselesaikan di Amerika Serikat. Janji politik dan harapan baru bagi masyarakat Amerika Serikat yang mendukung Trump. Gaya kepemimpinan seperti ini pantas diterapkan untuk memastikan bahwa keamanan nasional merupakan elemen penting negara. Melalui upaya-upaya komunikasi politik kepada audiens, Trump menunjukkan implementasi dari teori sekuritisasi yang berhasil mengalihkan isu non-tradisional menjadi isu keamanan. Implementasi sekuritisasi yang dilakukan Trump memperlihatkan bahwa strategi politik di dalam birokrasi dan parlemen juga menentukan. Di samping upaya meyakinkan para konstituen.

KESIMPULAN

Trump sebagai aktor sekuritisasi berusaha menggambarkan bahwa Amerika sedang dalam kondisi tidak hebat, bahwa Amerika sedang dalam kondisi di luar kendali. Hal ini ditunjukkan oleh keberadaan belasan juta imigran ireguler atau 'ilegal' yang membawa masalah mulai dari perdagangan narkoba, kejahatan seksual, tindakan kriminal, hingga berbagai imigran radikal Islam yang dianggap dalang dan mendukung banyaknya aksi terorisme di AS. Sehingga melalui penyampaian pidato keamanan, Trump mengalihkan isu migrasi menjadi isu nasional yang harus segeraditangani secara serius. Keseriusan itu ditunjukkan dengan kebijakan-kebijakan migrasi baru yang dikeluarkan setelah menjadi presiden. Keberhasilan proses sekuritisasi ditunjukkan dengan dukungan yang kuat di parlemen dan masyarakat selama proses pemilihan. Lalu, dilanjutkan dengan upaya memperkuat dukungan di pemerintahan dengan mengganti orang yang tidak pro kepada Trump. Tujuan keamanan nasional Trump sangat jelas untuk menjadikan "Amerika Hebat Kembali".

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih peneliti sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan pemahaman ilmu. Shalawat juga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik. Terima kasih juga peneliti sampaikan kepada keluarga yang selalu memberikan dukungan moral dan materiil. Peneliti juga menyampaikan ribuan terima kasih kepada guru-guru yang menjadi jalan sampainya ilmu dari Allah serta kolega yang membantu dalam diskusi sehari-hari. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak-pihak lain yang banyak membantu sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Mohon maaf peneliti belum bisa mencantumkan nama kalian satu per satu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ballotpedia. (2016). "The Republican Platform and RNC Platform Committee". Dikutip dari https://ballotpedia.org/The_Republican_Platform_and_RNC_Platform_Committee,_2016#What_is_the_platform.3F pada tanggal 30 Maret 2017.
- BBC. (2016). "Donald Trump: Mexico will pay for wall, '100%'". *BBC-news*. Dikutip dari <http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37241284> pada tanggal 16 Maret 2017.
- Buzan B, Weaver O, dan Wilde J. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Lynne Rienner. Colorado.
- Emmers R. (2002). *The Securitization of Transnational Crime in ASEAN*. Institute of Defence and Strategic Studies. Singapore.
- Emmers R. (2007). "Securitization". Dalam *Contemporary Security Studies*, ed. Allan Collins, hlm. 111-115. Oxford University Press. New York.
- Garver R. (2015). "Donald Trump just showed why his campaign is doomed". Dikutip dari <http://www.businessinsider.co.id/donald-trump-just-showed-why-his-campaign-is-doomed-2015-7/?r=US&IR=T#Y8aH5io7GhbHWyyf.97> pada tanggal 30 Maret 2017.
- Haddon H. (2015). "Donald Trump Says Immigrant Deportations Done in Two Years". Dikutip dari *Wall Street Journal: In September 2015, Trump said it would take 18 months to 2 years to deport 11 million undocumented immigrants with "really good management"*.
- Henderson B. (2017). "Barack Obama hits out at Donald Trump, warning 'American values' are at stake". *Telegraph*. Dikutip dari <http://www.telegraph.co.uk/news/2017/01/30/british-dual-citizens-will-now-allowed-travel-us-boris-johnson/> pada tanggal 5 April 2017.
- Hough P. (2008). *Understanding Global Security (2nd ed)*. Routledge. New York.
- Jones J M. (2015). "One in Five Voters Say Immigration Stance Critical to Vote". Dikutip dari http://www.gallup.com: http://www.gallup.com/poll/185381/one-five-voters-say-immigration-stance-critical-vote.aspx?g_source=immigration&g_medium=search&g_campaign=tiles pada tanggal 30 Maret 2017.
- Koser K. (2005). *Irregular migration, State security and Human security*. London.
- Martinez O J. (1994). "The Dynamics of Border Interaction: New Approaches to Border Analysis". Dalam *Global Boundaries: World Boundaries Vol. 1*. C. H. Schofield (editor). Routledge. London.
- National Geographic Indonesia. (2017). "Dinding Perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko Sudah Ada, dan Kami Mengunjunginya". Dikutip dari <http://nationalgeographic.co.id/berita/2017/01/dinding-perbatasan-amerika-serikat-dan-meksiko-sudah-ada-dan-kami-mengunjunginya> pada tanggal 6 April 2017.
- Pitoko R A. (2017). "Donald Trump Bangun Tembok Perbatasan AS-Meksiko". *Kompas.com*. Dikutip dari <http://properti.kompas.com/read/2017/01/2>

- 7/070000521/donald.trump.bangun.tembok.perbatasan.as-meksiko pada 6 April 2017.
- Politico. (2016). "Transcript: Donald Trump's national security speech". Dikutip dari <http://www.politico.com/story/2016/06/transcript-donald-trump-national-security-speech-224273> pada tanggal 30 Maret 2017.
- Shabad R. (2017). "No, Trump's victory was not the biggest Electoral College win since Reagan". Dikutip dari <http://www.cbsnews.com/news/no-trumps-victory-was-not-the-biggest-electoral-college-win-since-reagan/> pada tanggal 7 April 2017.
- Roe P. (2007). "Societal Security". Dalam *Contemporary Security Studies*. Allan Collins. New York. Oxford University Press.
- Syaiful R A. (2010). *Pembentukan Badan Gabungan Khusus Untuk Penanggulangan Jaringan Teror di Indonesia*. Tesis. Universitas Indonesia.
- The White House. (2017). "Executive Order Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States". Dikutip dari <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/01/27/executive-order-protecting-nation-foreign-terrorist-entry-united-states> pada tanggal 30 Maret 2017.
- The White House. (2017). "Executive Order Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States". Dikutip dari <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/03/06/executive-order-protecting-nation-foreign-terrorist-entry-united-states> pada tanggal 30 Maret 2017.
- The White House. (2017). "Executive Order: Border Security and Immigration Enforcement Improvements". Dikutip dari <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/01/25/executive-order-border-security-and-immigration-enforcement-improvements> pada tanggal 30 Maret 2017.
- Thiel M. (2007). "Identity, Societal Security and Regional Integration in Europe". Dalam *Jean Monnet/Robert Schuman Paper Series, Vol. 7 No. 6*.
- TIME. (2015). "Here's Donald Trump's Presidential Announcement Speech". *Time.com*. Dikutip dari <http://time.com/3923128/donald-trump-announcement-speech/> pada tanggal 30 Maret 2017.
- Trump D. (2015). "Donald J. Trump Statement on Preventing Muslim Immigration". Dikutip dari <https://www.donaldjtrump.com/press-releases/donald-j.-trump-statement-on-preventing-muslim-immigration> pada tanggal 16 Maret 2017.
- Ullman R. (1983). "Redefining Security". *International Security Journal Vol. 8*, dalam, Navnita Chadha Bedhera, A South Asian Debate on Peace and Security: An Alternative Formulation in The Post –Cold War Era (2004). Dikutip dari http://www.afes-press.de/pdf/Hague/Chadha_Behera_South_Aasian_debate.pdf pada tanggal 5 April 2017.
- VOA Indonesia. (2016). "Donald Trump Terpilih Sebagai Presiden AS Ke-45". Dikutip dari <http://www.voaindonesia.com/a/donald-trump-terpilih-jadi-presiden-as/3588848.html> pada tanggal 7 April 2017.
- Williams M C. (2003). "Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics". *International Studies Quarterly 47: 511-531*.

